



**PEMERINTAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**LKjIP**

**(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)**



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

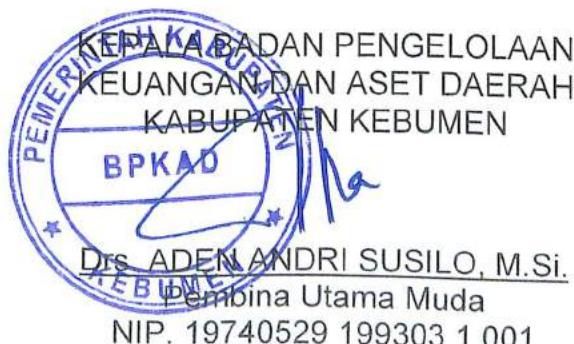
Dengan memanjangkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

Secara teknis tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Stategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan dalam upaya meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas, seberat atau sesulit apapun dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan apabila dilandasi dengan niat baik, adanya tekad dan semangat untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya, maka kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini kami ucapkan terima kasih dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat.



## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	1
C. Aspek Stratejik Organisasi .....	13
D. Permasalahan Utama.....	14
E. Sistematika Pelaporan.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
A. Rencana Stategis 2016-2021 .....	15
B. Visi dan Misi .....	15
C. Tujuan dan Sasaran .....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Analisis Pencapaian Kinerja .....	19
C. Akuntabilitas Keuangan.....	22
BAB IV PENUTUP.....	28
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2021	
- Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021	

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menghadapi perkembangan jaman saat ini, Pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menyusun laporan kinerja yang berisikan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja atas kegiatan tahun 2021.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2021 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah serta tujuan meraih predikat WTP Opini BPK atas LKPD, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Stratejik (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

### **B. Gambaran Umum Organisasi**

#### **1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Pengelolaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
4. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 101 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
  1. Sub Bidang Penyusunan APBD; dan
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi APBD.

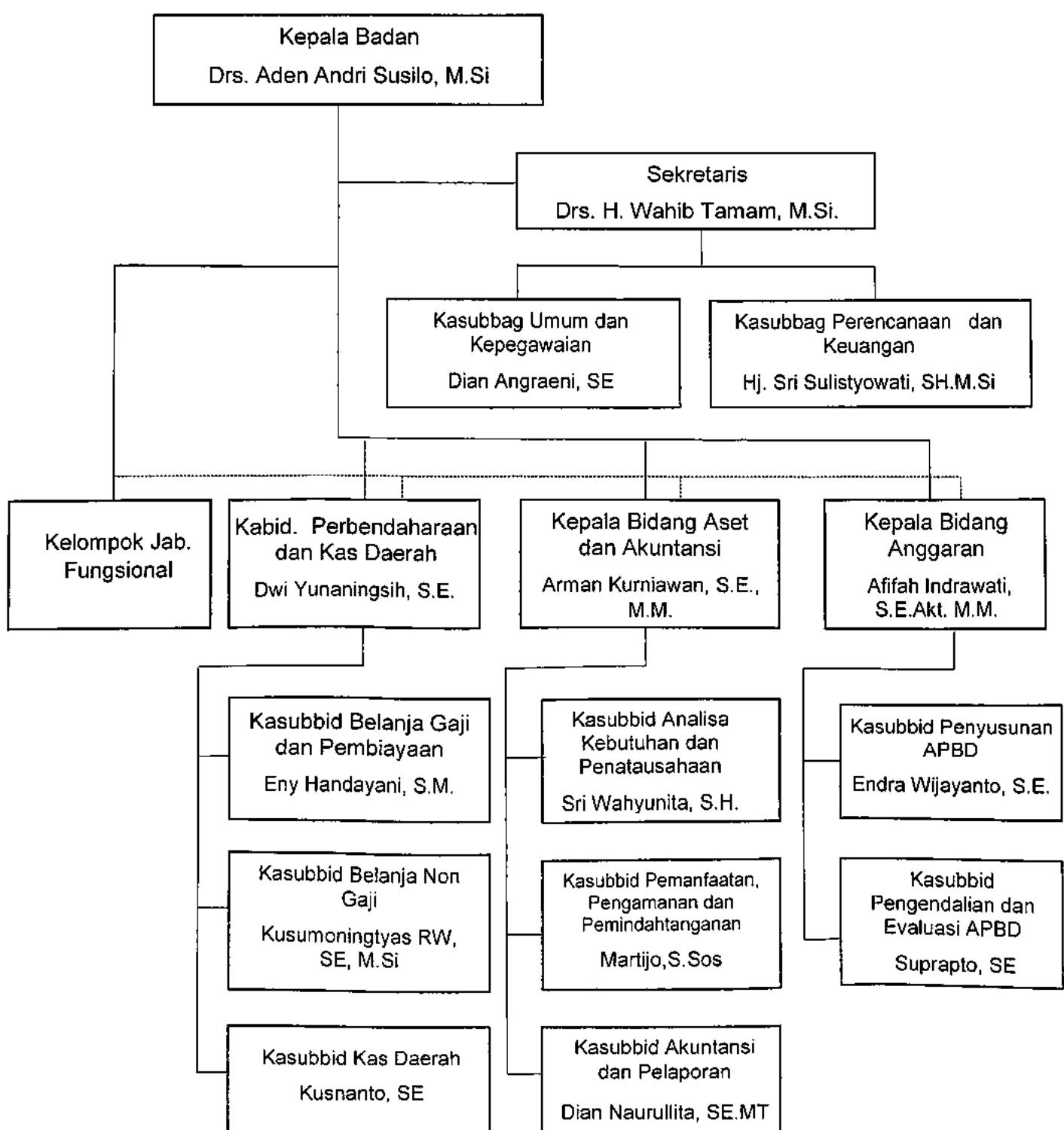
d. Bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :

1. Sub Bidang Belanja Gaji dan Pembiayaan;
2. Sub Bidang Belanja Non Gaji; dan
3. Sub Bidang Kas Daerah.

e. Bidang Aset dan Akuntansi, membawahi:

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan; dan
3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN**



### **(1) Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

### **(2) Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Badan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Badan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan,

penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

**(3) Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Anggaran;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran Pemerintah Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi atas proses penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan dan pengelolaan utang dan pinjaman Daerah;
- g. penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah;
- h. penyusunan standarisasi harga;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 sub bidang yaitu :

- a. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Perkiraan Plafon Anggaran Sementara, penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mengoordinasikan penyusunan dan melakukan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah, melaksanakan persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memvalidasi anggaran kas dan penyiapan Surat
- b. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Subbidang Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun anggaran Perangkat Daerah, penyiapan pinjaman dan pengelolaan utang Daerah, penatausahaan investasi/penyertaan modal Daerah dan penyusunan standarisasi harga.

#### **(4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan belanja, perbendaharaan dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan penelitian

- kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar, pemberian pembebasan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- c. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
  - e. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
  - f. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
  - h. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
  - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memiliki 3 sub bidang yaitu :

- a. Subbidang Belanja Gaji dan Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja gaji dan pembiayaan meliputi penatausahaan pembiayaan daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah, register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja gaji dan pembiayaan, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana gaji dan pembiayaan dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana gaji dan pembiayaan serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana gaji dan pembiayaan, penelitian, pengoreksian dan pemberian persetujuan pembebangan rincian penggunaan atas pengesahan Surat

Pertanggungjawaban gaji dan pembiayaan, pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun berkenaan, penelitian dan pengkoreksian kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, pembinaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan perpendaharaan, penerbitan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban gaji dan pembiayaan, penyusunan, pengkoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait belanja gaji dan pembiayaan, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait belanja gaji dan pembiayaan, dan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah, pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan belanja gaji dan pembiayaan daerah

- b. Subbidang Belanja Non Gaji mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penatausahaan belanja non gaji meliputi pembinaan teknis pengelolaan kas daerah, bimbingan teknis pemindahbukuan kas daerah, pelaksanaan register Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja non gaji Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana non gaji dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana non gaji serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana non gaji, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban non gaji, pembinaan terhadap Satuan Kerja

Perangkat Daerah dalam hal pelaksanaan perbendaharaan, perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban non gaji, penyusunan, pengkoreksian, dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja non gaji, penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terkait belanja non gaji, dan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.

- c. Subbidang Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan kas daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah, pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah, pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban penerimaan kas, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah, perumusan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas; pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah, penyusunan dan pelaporan aliran kas secara periodik, penyusunan, pengkoreksian dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang daerah, pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah, dan penagihan piutang

daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

#### **(5) Bidang Aset dan Akuntansi**

Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset dan akuntansi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Aset dan Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- b. penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Daerah;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data administrasi barang milik Daerah;
- d. pengendalian penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- e. pelaksanaan pemindahtanganan;
- f. penyimpanan seluruh bukti sah kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional;
- g. menyiapkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang penunjukan Pengurus Barang/Pengurus Barang Pembantu;
- h. pengkoordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah;
- i. pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang/kerugian Daerah;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan semesteran dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. penyajian informasi keuangan Daerah dan pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan Daerah;
- l. pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah;
- m. pengesahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 3 sub bidang yaitu :

a. Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan

Subbidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi inventarisasi dan pengolahan data barang milik daerah, pengkajian analisa kebutuhan barang berdasarkan hasil pengolahan data guna melakukan evaluasi terhadap belanja pengadaan barang, penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah, penyusunan dan penyampaian Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan Tahunan.

b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan

Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah, penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah berupa tanah dan kendaraan operasional, pelaksanaan proses pemindahtanganan.

c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengordinasian proses akuntansi dan pelaporan keuangan Daerah, penyusunan laporan realisasi semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyiapannya penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah, penyiapannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, pelaksanaan sinkronisasi data keuangan dengan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan Daerah, pengelolaan piutang/kerugian Daerah, penyiapannya pengesahan laporan pertanggungjawaban fungsional penerimaan dan pengeluaran Perangkat Daerah, penyiapannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja, penyiapannya penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Secara kuantitas Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berjumlah 66 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 50 orang, PTT 1 orang dan Tenaga Harian Lepas 15 orang, dengan kualifikasi pendidikan terdiri dari :

NO	PENDIDIKAN	PNS	NON PNS
1.	S2	8	
2.	S1	19	5
3.	D3	-	6
4.	SMA	20	5
5.	SMP	2	
6.	SD	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>16</b>

PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menurut pangkat/golongan ruang terdiri dari:

NO	GOLONGAN	RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1.	IV	e	Pembina Utama	-
2.	IV	d	Pembina Utama Madya	-
3.	IV	c	Pembina Utama Muda	1
4.	IV	b	Pembina Tingkat I	1
5.	IV	a	Pembina	4
6.	III	d	Penata Tingkat I	8
7.	III	c	Penata	4
8.	III	b	Penata Muda Tingkat I	18
9.	III	a	Penata Muda	5
10.	II	d	Pengatur Tingkat I	4
11.	II	c	Pengatur	3
12.	II	b	Pengatur Muda Tingkat I	-
13.	II	a	Juru Pengatur Muda	-
14.	I	d	Tingkat I	2
15.	I	c	Juru	-
16.	I	b	Juru Muda Tingkat I	-
17.	I	a	Juru Muda	-
18.	PTT			1
19.	Tenaga Harian Lepas			15
<b>JUMLAH</b>				<b>66</b>

Secara keseluruhan menurut tingkat pendidikan lulusan SMA merupakan yang terbanyak, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia melalui bimbingan teknis, kursus atau pelatihan khusus terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pegawai untuk meningkatkan kinerja. Diklat bagi pejabat struktural sudah terlaksana 93,33% dan diupayakan bisa tercapai 100%.

### C. Aspek Stratejik Organisasi

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan SKPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJM Kabupaten Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2016-2021 maka strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai berikut :

#### 1. Kebijakan :

Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan.

#### 2. Strategi

- a. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran serta kapasitas Keuangan daerah.
- b. Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring - evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.

#### **D. Permasalahan Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Permasalahan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai target Kinerja Utama, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah.
2. Kurang cermatnya SKPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan.
3. Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini SKPD belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.

#### **E. Sistematika Pelaporan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen, Permasalahan SKPD, dan Sistematika penulisan LKjIP.

##### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

##### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

##### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis 2016-2021**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

### **B. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 adalah :

**“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul,  
Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”**

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ke enam dari enam misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yaitu: Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*) dengan jalan menciptakan kualitas pelayan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel yang di dukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

### C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

**Tabel 2.1**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah</li><li>2. Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah</li><li>3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Opini BPK atas LKPD</li><li>2. Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD</li><li>3. Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset</li></ol>

#### **D. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dengan Bupati Kebumen, menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Lampiran 1.

Untuk mendukung target indikator perjanjian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2021 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja utama sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dalam memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sepenuhnya ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 ini.

### **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal**

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang
5.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Tidak Tercapai
6.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapai

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen di presentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
1.	Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2019	WTP	WTP atas LKPD 2020	WTP	WTP	100%	Tercapai
2.	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	95,57%	96%	98,62%	103%	96%	96%	Sangat Baik
3.	Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	96%	95%	95,76%	100,80%	95%	95%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa 3 (tiga) target kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen telah tercapai yaitu 2 (dua) indikator tercapai sangat baik, dan 1 (satu) indikator tercapai dengan kriteria tercapai. Jadi, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Sangat Baik.

### **B. Analisis Pencapaian Kinerja**

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap perbedaan kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2021 dapat menyajikan informasi

yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

### 1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2019	WTP	WTP atas LKPD 2020	WTP	WTP	100%

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Tahun 2021 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020, sedangkan Tahun 2021 belum dilakukan audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi atas kualitas laporan keuangan dengan mempertimbangkan Indikator :

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- Kualitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Selain itu, ada 5 kriteria yang dijadikan dasar penilaian atas kewajaran atas laporan keuangan antara lain, (1) Keterjadian dan keberadaan, (2) Penilaian, (3) Hak dan Kewajiban, (4) Kelangkaan dan (5) Pengungkapan. Kabupaten Kebumen senantiasa berupaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Untuk mencapai sasaran di atas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan indikator kinerja SKPD pencapaian sasaran 2 dan sasaran 3 sebagai berikut :

## 2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah dengan hasil pengukuran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	95,57%	96%	98,62%	103%	96%	96%

Persentase capaian kinerja pelayanan SKPD daerah diukur dari terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, bertambahnya jumlah sarana prasarana kantor yang memadai, tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan pada perangkat daerah dan tersedianya dokumen database perangkat daerah serta jumlah aparatur yang meningkat kapasitasnya.

## 3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir RPJMD 2021	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Capaian peningkatan pengelolaan keuangan dan aset	96%	95%	95,76%	100,80%	95%	95%
	Capaian realisasi belanja	90	93,98	104,42	90	90
	Capaian Penerbitan Dokumen Keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100
	Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu	83	85,78	103,35	83	83
	Capaian Realisasi Pendapatan	100	103,29	103,29	100	100

### C. Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.641.809.788.000,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.10.927.017.000,00, belanja modal sebesar Rp. 13.750.664.000,00, belanja tidak terduga sebesar Rp.6.216.770.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.610.915.337.000,00, untuk melaksanakan 3 program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan.

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 634.929.678.010,00 atau 98,93% dari total anggaran Rp.641.809.788.000,00. Realisasi belanja operasi sebesar Rp.10.204.372.960,00 atau 93,39% dari jumlah anggaran belanja operasi Rp.10.927.017.000,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp.13.634.470.000,00 atau 99,15% dari jumlah anggaran belanja modal Rp.13.750.664.000,00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar

Rp.545.318.400,00 atau 8,77% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp.6.216.770.000,00. Realisasi belanja transfer sebesar Rp.610.545.516.650,00 atau 99,94% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp.610.915.337.000,00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 3.6**  
**Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
<b>1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.927.017.000</b>	<b>10.204.372.960</b>	<b>93,39</b>
	Belanja Pegawai	6.641.427.000	6.115.318.835	92,08
	Belanja Barang dan Jasa	3.785.590.000	3.589.054.125	94,81
	Belanja Subsidi	500.000.000	500.000.000	100,00
<b>2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>13.750.664.000</b>	<b>13.634.470.000</b>	<b>99,15</b>
<b>3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>6.216.770.000</b>	<b>545.318.400</b>	<b>8,77</b>
<b>4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>610.915.337.000</b>	<b>610.545.516.650</b>	<b>99,94</b>
	Belanja Bagi Hasil	14.019.972.000	13.862.929.650	98,88
	Belanja Bantuan Keuangan	596.895.365.000	596.682.587.000	99,96
	<b>JUMLAH</b>	<b>641.809.788.000</b>	<b>634.929.678.010</b>	<b>98,93</b>

Realisasi belanja operasi hanya mencapai 93,39% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium, terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi, purna tugas dan meninggal dunia selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 99,15% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga hanya terealisasi sebesar 8,77% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 99,94% karena terdapat belanja bagi hasil pajak daerah bagi pemerintah kabupaten yang terealisasi tidak sesuai dengan yang dianggarkan karena banyak obyek wisata yang tutup karena pandemi covid 19 dan juga adanya belanja bantuan keuangan untuk operasional TPQ yang tidak terealisasi di 2 desa karena desa tersebut tidak memiliki TPQ, yakni Desa Kambangsari, Kec. Alian dan Desa Karangglonggong, Kec. Klierong. Selain itu juga terdapat bantuan keuangan khusus pekerjaan drainase saluran sundut di Desa Kemujan, Kecamatan Adimulyo yang tidak dapat terealisasi karena hal tersebut bukan kewenangan desa.

Secara rinci realisasi anggaran belanja yang realisasinya dibawah 90% antara lain program kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan, Pagu Anggaran sebesar Rp.29.347.000,00 terealisasi sebesar Rp.23.378.900,00 atau 79,66% dikarenakan bersifat penyediaan untuk penggandaan dan kebutuhan sudah terpenuhi. Selain itu, adanya efisiensi terhadap belanja karangan bunga karena adanya himbauan untuk tidak memberikan ucapan dalam bentuk karangan bunga dan sejenisnya.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pagu Anggaran sebesar Rp.2.100.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.817.500,00 atau sebesar 86,55% dikarenakan adanya efisiensi belanja materai dan kebutuhan sudah dapat dipenuhi. Selain itu, untuk belanja pengiriman juga terdapat efisiensi karena pengiriman surat lebih banyak menggunakan surat elektronik.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pagu Anggaran sebesar Rp.178.200.000,00 terealisasi sebesar Rp.132.759.383,00 atau sebesar 74,50% dikarenakan bersifat penyediaan dan adanya efisiensi terhadap penggunaan Telepon, Air dan Listrik.

Realisasi anggaran dan belanja dari 3 program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 3.6. berikut ini.

**Tabel. 3.6**  
**Capaian Anggaran Pendukung Sasaran**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Opini BPK atas LKPD	Opini	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	916.795.000	880.437.862	96,03
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	%	92,50		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	204.158.000	203.319.500	99,59
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	252.422.000	245.430.474	97,23

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	233.986.000	218.885.988	93,55
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.796.000	131.628.750	94,16
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	86.433.000	81.173.150	93,91
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	725.062.000	692.493.551	95,51
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	319.215.000	301.489.529	94,45
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	156.185.000	152.693.800	97,76
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	103.172.000	95.502.662	92,57
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	146.490.000	142.807.560	97,49
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	471.530.000	449.699.070	95,37
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	96.255.000	93.452.518	97,09
						Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraluran Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	172.711.000	165.128.102	95,61
						Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	65.361.000	60.176.850	92,07

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
3.	Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	137.203.000	130.941.600	95,44
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	617.632.107.000	611.590.835.050	99,02
						Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	500.000.000	500.000.000	100
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	596.895.365.000	596.682.587.000	99,96
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.216.770.000	545.318.400	8,77
						Pengetolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.019.972.000	13.862.929.650	98,88
						Pengelolaan Barang Milik Daerah	695.334.000	673.236.070	96,82
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	312.518.000	299.113.610	95,71
						Pengamanan Barang Milik Daerah	273.859.000	270.354.175	98,72
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	108.947.000	103.768.285	95,25
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.587.000	187.124.175	93,76
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.750.000	29.708.800	99,86
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.740.000	132.174.175	92,60
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.097.000	25.241.200	93,15
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.662.331.000	6.133.852.137	92,07
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.289.518.000	5.771.347.035	91,76
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.820.000	31.413.200	98,72
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.993.000	331.091.902	97,10
						Administrasi Kepegawaihan Perangkat Daerah	63.000.000	60.554.000	96,12
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63.000.000	60.554.000	96,12
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.497.000	190.188.511	94,39
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.300.000	5.895.000	93,57
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.500.000	74.634.290	96,30

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.347.000	23.378.900	79,66
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.300.000	6.185.000	98,17
						Penyediaan Bahan/Material	42.000.000	40.336.700	96,04
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.050.000	39.758.621	99,27
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.653.426.000	13.540.005.500	99,17
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.482.426.000	13.373.495.000	99,19
						Pengadaan Mebel	21.000.000	20.000.000	95,24
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	97.110.500	97,11
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	49.400.000	98,80
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.300.000	213.746.983	82,12
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	1.817.500	86,55
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.200.000	132.759.383	74,50
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	79.170.100	98,86
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	328.819.000	317.505.101	96,56
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	61.612.101	88,02
						Pemeliharaan Mebel	7.000.000	7.000.000	100
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	27.725.000	99,02
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.819.000	221.168.000	98,82
						JUMLAH	641.809.788.000	634.929.678.010	98,93

## **BAB IV** **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen merupakan perwujudan konkret tingkat pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen. Pada Tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan 3 (tiga) sasaran kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ingin dicapai.

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen secara rinci pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah/ Kabupaten) Tahun 2021 tercapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berupa Opini BPK RI atas LKPD Tahun 2020, sehingga Kabupaten Kebumen mendapatkan kali ketujuh dalam memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan empat tahun berturut-berturut.
2. Sasaran 2 dengan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen sudah mencapai target, Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sebesar 103%.
3. Sasaran 3 Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar 100,80%.

Rata-rata capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%, dan telah mencapai nilai  $\geq 75\%$  maka termasuk dalam kategori tercapai dan Sangat Baik. Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen dengan Penyerapan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.634.929.678.010,00 (98,93) dari total anggaran sebesar Rp. 641.809.788.000,00.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan tujuan organisasi. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan

untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen dapat terwujud.

Keberhasilan dalam mencapai target bukan berarti tidak ada permasalahan atau kendala. Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan terutama dalam proses penyusunan akuntansi, penyusunan laporan keuangan dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah.
2. Kurang cermatnya SKPD dalam penyusunan perencanaan anggaran kas dan pelaksanaan kegiatan
3. Masih lemahnya pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran kas, dalam hal ini SKPD belum konsisten dalam melaksanakan register resiko yang telah disusun.
4. Adanya peraturan baru mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan, ASN dan *stakeholder/pemangku* kepentingan dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain pemenuhan belanja mandatori, pelaksanaan/implementasi *money follow program*.
2. Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan.
3. Optimalisasi peran APIP dalam penerapan SPIP di masing-masing SKPD.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang milik daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.

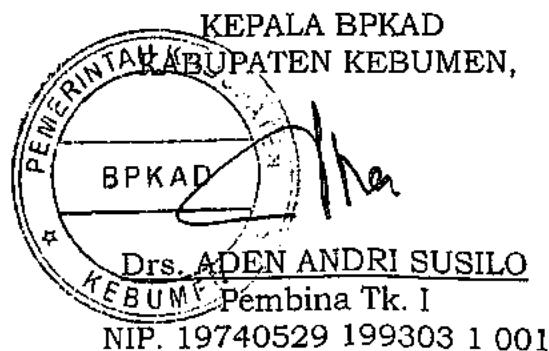


## RENCANA KERJA TAHUNAN

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun : 2021

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	96%
2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah Dan Aset Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	95%
3	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Opini BPK atas LKPD	WTP

Kebumen, 2020



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Proses/tase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD								96%						Kepala BPKAD Kab. Kebumen
		26,95	55,55	80,43	100	Penercanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.597.000		100%						Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		41,56	71,86	92,94	100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.500.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	Menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah berupa Perubahan Renstra 2016-2021 Renja, Perubahan Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD/LKPD  Melaksanakan forum SKPD					Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		25,61	54,38	79,94	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja keuangan yang disusun	26 dokumen	Menyusun LKjIP  Menyusun Laporan Keuangan Tahunan  Menyusun Laporan Semesteran					Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		17,95	43,67	69,05	100	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.097.000	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	4 dokumen	Melaksanakan Rapat Koordinasi POP/K					Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		4,37	10,65	15,60	100	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.750.063.000		100%						Sekretaris, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		4,21	10,25	14,96	100	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	36.385.260.000	Jumlah ASN yang menerima tamsil Presentase jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	55 orang	Melaksanakan Pembayaran Gaji  Melakukan Pembayaran Tamsil					Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIVITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)					
		(3)	(4)	(5)	(6)						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						
		17,84	35,67	74,77	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.000.000	Jumlah kegiatan penunjang tugas ASN	2 kegiatan	Pembayaran PIT Pembayaran Karnaval						Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				
		21,13	52,57	80,80	100	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324.803.000	Jumlah dokumen data penatausahaan keuangan	12 dokumen, 13 orang	Melaksanakan penatausahaan kerja Verifikasi SKPD Verifikasi PPKD/ Bantuan Keuangan						Kasubbag Perencanaan dan Keuangan				
		0,00	0,00	0,00	100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000		1 Paket							Sekretaris, Kasubbag Umpeg				
		0,00	0,00	0,00	100	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	63.000.000	Jumlah paket Bimtek, Workshop dan semknar terkait pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset						Kasubbag Umum Kepegawaian				
		20,39	53,21	73,33	100	Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.497.000		100%							Sekretaris, Kasubbag				
		31,74	63,49	100,00	100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.300.000	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Belanja alat listrik dan elektronik						Kasubbag Umum Kepegawaian				
		24,18	48,37	72,55	100	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.500.000	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	Menyediakan makanan dan minuman rapat serta makan minum tamu						Kasubbag Umum Kepegawaian				
		7,60	53,14	78,69	100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.347.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan dan penjilidan	12 Bulan	Penggandaan, cetak, dan jilid						Kasubbag Umum Kepegawaian				
		19,05	61,90	80,95	100	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.300.000	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	3 Jenis	Langgaran surat kabar dan majalah serta bahan bacaan Peraturan Perundang-Undangan						Kasubbag Umum Kepegawaian				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		0,00	64,11	64,11	100	Penyediaan Bahan/Material	42.000.000	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	12 Bulan	Belanja alat tulis kantor						Kasubbag Umum Kepegawaian
		25,39	50,17	74,94	100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.050.000	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	55 Orang	Menyediakan akomodasi dan perjalanan dinas luar daerah						Kasubbag Umum Kepegawaian
		1,77	100,00	100,00	100	Pengadaan Badan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.291.768.000		100%							Sekretaris, Kasubbag Umpeg
		0,00	100,00	100,00	100	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.120.768.000	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	449 unit	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 2 untuk Kepala Desa						Kasubbag Umum Kepegawaian
		100,00	100,00	100,00	100	Pengadaan Mebel	21.000.000	Jumlah Unit Pengadaan Mebeleur	1 unit	Pengadaan rak besi						Kasubbag Umum Kepegawaian
		78,41	100,00	100,00	100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin lainnya gedung kantor	1 unit							Kasubbag Umum Kepegawaian
		23,28	100,00	100,00	100	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit							Kasubbag Umum Kepegawaian
		23,78	48,16	74,34	100	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.100.000		12 Bulan							Sekretaris
		2,38	14,29	64,29	100	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	Penyediaan perangko materai, benda pos lainnya dan pengiriman surat/dokumen kantor						Kasubbag Umum Kepegawaian
		24,00	48,75	73,75	100	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Membayar telepon, air, dan listrik						Kasubbag Umum Kepegawaian

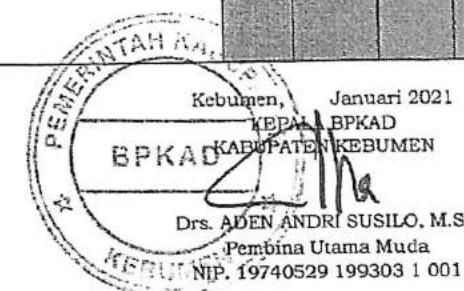
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		23,79	47,57	76,08	100	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas kebersihan kantor	12 Bulan 5 Orang	Menbayar tenaga kebersihan						Kasubbag Umum Kepegawaian
		21,94	73,51	93,25	100	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.000.000									Sekretaris, Kasubbag Umpeg
		29,86	60,32	86,14	100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	Servis kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, penggantian suku cadang, pembelian BBM, dan membayar pajak kendaraan roda 4 dan roda 2						Kasubbag Umum Kepegawaian
		35,71	71,42	100,00	100	Pemeliharaan Mebel	7.000.000	Jumlah Unit pemeliharaan rutin/berkala mebelleur	1 unit	Pemeliharaan ringan perawatan melebur dan pemeliharaan ringan untuk pemeliturkan warna						Kasubbag Umum Kepegawaian
		37,09	60,63	97,50	100	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	Perbaikan peralatan kerja						Kasubbag Umum Kepegawaian
		0,00	100,00	100,00	100	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.000.000	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	Pemeliharaan gedung kantor dan upah tukang						Kasubbag Umum Kepegawaian
Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah Dan Dokumen Dokumen Keuangan Daerah	Opini BPK atas LKPD, Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.265.319.000	Capaian Realisasi Belanja, Capaian Penerbitan Dokumen keuangan Daerah tepat waktu, Capaian Realisasi Pendapatan	96%						Kepala BPKAD Kab. Kebumen, Sekretaris, Kabid Anggaran, Kabid Askun, Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		30,31	61,43	81,26	100	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	280.215.000	Jumlah dokumen Rekonsiliasi harian Jumlah dokumen Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Bank Persentase laporan realisasi OPD	270 Dokumen 60 Dokumen 100 %	Melaksanakan tertib administrasi rekonsiliasi pelaporan keuangan data Kas Daerah dengan Bank dan BKU Manual dengan Aplikasi SIMDA serta pengelolaan dana APBD dan transfer daerah dan pemeliharaan Sistem Aplikasi SIPATMA dan Aplikasi SIMKASDA						Kasubbid Kas Daerah
		17,08	52,27	87,22	100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realiasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Finak Ketiga	166.185.000	Persentase Tertib Penelitian SPM dan Penerbitan SKPP	100%	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realiasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Finak Ketiga						Kasubbid Belanja Gaji dan Pembiayaan
		18,40	54,03	81,40	100	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	110.672.000	Persentase Penerbitan SP2D	100%	Melaksanakan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait						Kasubbid Non Gaji
\		35,48	55,04	90,63	100	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	167.990.000	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD	3 Dokumen 4 Kegiatan	Melaksanakan pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara SKPD.						Kasubbid Non Gaji
		23,28	41,90	64,54	100	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	546.349.000		100%							Kepala Bidang Aset dan Akuntansi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)	
		TW I	TW II	TW III	TW IV						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		23,01	41,21	78,11	100	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	124.081.000	Jumlah dokumen pengesahan Laporan Fungsional SKPD	828 Dokumen	Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perbup, dan Laporan Semesteran					Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan	
		49,64	93,33	98,75	100	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	172.711.000	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	Melaksanakan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Perbup, dan Laporan Semesteran					Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan	
		2,22	4,43	54,92	100	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	65.361.000	Jumlah Dokumen Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	Menyusun Dokumen Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun					Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan	
		6,21	7,43	26,73	100	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atau Kota	184.196.000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan daerah	4 Kegiatan	Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan daerah					Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan	
Pengelolaan Keuangan berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah Dan	Opini BPK atas LKPD, Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	695.334.000	Capaian SKPD Tertib Administrasi Aset Tepat Waktu	83%						Kepala BPKAD Kab. Kebumen, Sekretaris, Kabid Asku	
		29,59	46,69	84,84	100	Pengelolaan Barang Milik Daerah	695.334.000		100%							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA SASARAN				PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	OUTPUT	TARGET	URAIAN KEGIATAN (AKTIFITAS)	JADWAL PELAKSANAAN				KETERANGAN (STRUKTURAL)					
		TW I	TW II	TW III	TW IV						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)									
		8,14	25,29	85,00	100	Penatausahaan Barang Milik Daerah	312.518.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen 1 Kegiatan	Jumlah dokumen pengolahan data barang milik daerah dan penilaian aset					Kasubbid Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan					
		59,87	67,35	88,10	100	Pengamanan Barang Milik Daerah	228.869.000	Jumlah patok tanah Barang Milik Daerah yang terpasang Jumlah plang papan nama Barang Milik Daerah yang terpasang Jumlah unit kendaraan dinas Milik Daerah yang diasuransikan	200 Buah 100 Buah 5 unit	Memasang plang tanda kepemilikan tanah pemda, bangunan/gedung, patok tanah batas pemda, dan membayar asuransi kendaraan dinas yang yang terbayar					Kasubbid Pemanfaatan Pengamanan dan Pemindahtagana n					
		28,15	59,46	79,65	100	Optimalisasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtagangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	153.947.000	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemindahtagangan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	Melaksanakan kegiatan penjualan Barang Milik Daerah/Lelang dengan instansi lain KPKNL Purwokerto					Kasubbid Pemanfaatan Pengamanan dan Pemindahtagana n					



# LAPORAN TARGET DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

## Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2021

S/D AKHIR BULAN DESEMBER 2021

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD BULAN INI			REALISASI KEUANGAN								REAL. FISIK	SELISIH			
			KEU (ANGGARAN KAS)		FISIK	SP2D SD BULAN LALU	SP2D BULAN INI	SP2D SD BULAN INI		SPJ SD BULAN LALU	SPJ BULAN INI	SPJ SD BULAN INI			KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)		(%)	(%)	(%)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	BELANJA	646.909.788.000	646.909.788.000	100,00	100,00	201.166.312.471	438.867.279.060	640.033.591.531	98,94	201.096.334.052	438.933.343.958	640.029.678.010	98,94	100,00	1,06	1,06	0,00	
	PEMBIAYAAN	5.100.000.000	5.100.000.000	100,00	100,00	5.100.000.000	-	5.100.000.000	100,00	5.100.000.000	-	5.100.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000	3.000.000.000	100,00	100,00	3.000.000.000	-	3.000.000.000	100,00	3.000.000.000	-	3.000.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	100,00	1.500.000.000	-	1.500.000.000	100,00	1.500.000.000	-	1.500.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir	600.000.000	600.000.000	100,00	100,00	600.000.000	-	600.000.000	100,00	600.000.000	-	600.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	623.921.625.000	623.921.625.000	100,00	100,00	192.387.226.606	424.974.955.479	617.362.182.085	98,95	192.387.226.606	424.974.955.479	617.362.182.085	98,95	98,95	1,05	1,05	1,05	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.289.518.000	6.289.518.000	100,00	100,00	5.083.235.456	688.111.579	5.771.347.035	91,76	5.083.235.456	688.111.579	5.771.347.035	91,76	91,76	8,24	8,24	8,24	
2	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	500.000.000	500.000.000	100,00	100,00	500.000.000	-	500.000.000	100,00	500.000.000	-	500.000.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3	Analisis Perencanaan dan Penyaluran	596.895.365.000	596.895.365.000	100,00	100,00	186.171.923.100	410.510.663.900	596.682.587.000	99,96	186.171.923.100	410.510.663.900	596.682.587.000	99,96	99,96	0,04	0,04	0,04	
4	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.216.770.000	6.216.770.000	100,00	100,00	545.318.400	-	545.318.400	8,77	545.318.400	-	545.318.400	8,77	8,77	91,23	91,23	91,23	
5	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.019.972.000	14.019.972.000	100,00	100,00	86.749.650	13.776.180.000	13.862.929.650	98,88	86.749.650	13.776.180.000	13.862.929.650	98,88	98,88	1,12	1,12	1,12	
	BELANJA LANGSUNG	17.888.163.000	17.888.163.000	100,00	100,00	3.679.085.865	13.892.323.581	17.571.409.446	98,23	3.609.107.446	13.958.388.479	17.567.495.925	98,21	100,00	1,77	1,79	0,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.750.000	29.750.000	100,00	100,00	-	-	-	-	29.708.800	-	29.708.800	99,86	100,00	0,14	0,00	0,00	
	- Belanja Honorarium	11.847.000	11.847.000	100,00	100,00	-	-	-	-	11.847.000	-	11.847.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	17.903.000	17.903.000	100,00	100,00	-	-	-	-	17.861.800	-	17.861.800	99,77	100,00	0,23	0,00	0,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	142.740.000	142.740.000	100,00	100,00	-	-	-	-	128.820.175	3.354.000	132.174.175	92,60	100,00	7,40	0,00	0,00	
	- Belanja Honorarium	15.708.000	15.708.000	100,00	100,00	-	-	-	-	15.633.000	-	15.633.000	99,52	100,00	0,48	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	127.032.000	127.032.000	100,00	100,00	-	-	-	-	113.187.175	3.354.000	116.541.175	91,74	93,06	8,26	6,94	6,94	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.097.000	27.097.000	100,00	100,00	-	-	-	-	25.241.200	-	25.241.200	93,15	100,00	6,85	0,00	0,00	
	- Belanja Honorarium	5.973.000	5.973.000	100,00	100,00	-	-	-	-	5.973.000	-	5.973.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	21.124.000	21.124.000	100,00	100,00	-	-	-	-	19.268.200	-	19.268.200	91,21	100,00	8,79	0,00	0,00	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	31.820.000	31.820.000	100,00	100,00	-	-	-	-	27.743.200	3.670.000	31.413.200	98,72	100,00	1,28	0,00	0,00	
	- Belanja Honorarium	5.973.000	5.973.000	100,00	100,00	-	-	-	-	5.973.000	-	5.973.000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	25.847.000	25.847.000	100,00	100,00	-	-	-	-	21.770.200	3.670.000	25.440.200	98,43	100,00	1,57	0,00	0,00	
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.993.000	340.993.000	100,00	100,00	-	-	-	-	299.125.902	31.966.000	331.091.902	97,10	100,00	2,90	0,00	0,00	
	- Belanja Honorarium	91.981.000	91.981.000	100,00	100,00	-	-	-	-	89.881.000	700.000	90.581.000	98,48	100,00	1,52	0,00	0,00	

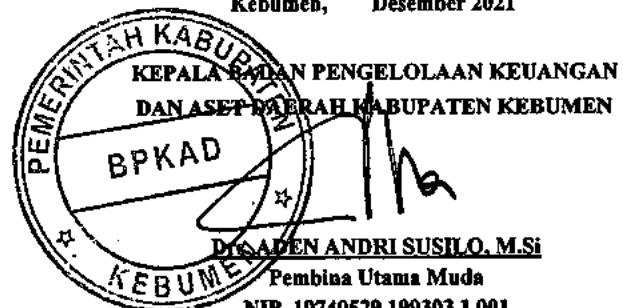
NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD BULAN INI				REALISASI KEUANGAN								REAL FISIK	SELISIH			
			KEU (ANGGARAN KAS)		FISIK	SP2D SD BULAN LALU	SP2D BULAN INI	SP2D SD BULAN INI		SPJ SD BULAN LALU	SPJ BULAN INI	SPJ SD BULAN INI				KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
- Belanja Barang dan Jasa	249.012.000	249.012.000	100,00	100,00						209.244.902	31.266.000	240.510.902	96,59	100,00		3,41	0,00		
6 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	63.000.000	63.000.000	100,00	100,00						54.286.000	6.268.000	60.554.000	96,12	100,00		3,88	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	63.000.000	63.000.000	100,00	100,00						54.286.000	6.268.000	60.554.000	96,12	100,00		3,88	0,00		
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00						5.895.000	-	5.895.000	93,57	100,00		6,43	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00						5.895.000	-	5.895.000	93,57	100,00		6,43	0,00		
8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.500.000	77.500.000	100,00	100,00						68.419.790	6.214.500	74.634.290	96,30	100,00		3,70	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	77.500.000	77.500.000	100,00	100,00						68.419.790	6.214.500	74.634.290	96,30	100,00		3,70	0,00		
9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.347.000	29.347.000	100,00	100,00						22.738.500	640.400	23.378.900	79,66	100,00		20,34	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	29.347.000	29.347.000	100,00	100,00						22.738.500	640.400	23.378.900	79,66	100,00		20,34	0,00		
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00						5.806.000	379.000	6.185.000	98,17	100,00		1,83	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	6.300.000	6.300.000	100,00	100,00						5.806.000	379.000	6.185.000	98,17	100,00		1,83	0,00		
11 Penyediaan Bahan/Material	42.000.000	42.000.000	100,00	100,00						40.336.700	-	40.336.700	96,04	100,00		3,96	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	42.000.000	42.000.000	100,00	100,00						40.336.700	-	40.336.700	96,04	100,00		3,96	0,00		
12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.050.000	40.050.000	100,00	100,00						39.758.621	-	39.758.621	99,27	100,00		0,73	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	40.050.000	40.050.000	100,00	100,00						39.758.621	-	39.758.621	99,27	100,00		0,73	0,00		
13 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.482.426.000	13.482.426.000	100,00	100,00						2.275.000	13.371.220.000	13.373.495.000	99,19	100,00		0,81	0,00		
- Belanja Modal	13.482.426.000	13.482.426.000	100,00	100,00						2.275.000	13.371.220.000	13.373.495.000	99,19	100,00		0,81	0,00		
14 Pengadaan Mebel	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00						20.000.000	-	20.000.000	95,24	100,00		4,76	0,00		
- Belanja Modal	21.000.000	21.000.000	100,00	100,00						20.000.000	-	20.000.000	95,24	100,00		4,76	0,00		
15 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	100.000.000	100,00	100,00						97.110.500	-	97.110.500	97,11	100,00		2,89	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	2.762.000	2.762.000	100,00	100,00						2.535.500	-	2.535.500	91,80	100,00		8,20	0,00		
- Belanja Modal	97.238.000	97.238.000	100,00	100,00						94.575.000	-	94.575.000	97,26	100,00		2,74	0,00		
16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00						49.400.000	-	49.400.000	98,80	100,00		1,20	0,00		
- Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00						49.400.000	-	49.400.000	98,80	100,00		1,20	0,00		
17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00						1.817.500	-	1.817.500	86,55	100,00		13,45	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00						1.817.500	-	1.817.500	86,55	100,00		13,45	0,00		
18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.200.000	178.200.000	100,00	100,00						121.894.150	10.865.233	132.759.383	74,50	100,00		25,50	0,00		
- Belanja Barang dan Jasa	178.200.000	178.200.000	100,00	100,00						121.894.150	10.865.233	132.759.383	74,50	100,00		25,50	0,00		
19 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.000.000	80.000.000	100,00	100,00						66.710.475	12.459.625	79.170.100	98,96	100,00		1,04	0,00		

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD BULANINI		REALISASI KEUANGAN								REAL. FISIK	SELISIH			
			KEU (ANGGARAN KAS)		SP2D SD BULAN LALU	SP2D BULANINI	SP2D SD BULANINI	SPJ SD BULAN LALU	SPJ BULANINI	SPJ SD BULANINI	KEU SP2D	KEU SPJ		KEU	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Belanja Barang dan Jasa	80.000.000	80.000.000	100,00	100,00						66.710.475	12.459.625	79.170.100	98,96	100,00		1,04	0,00
20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00						54.588.990	7.023.111	61.612.101	88,02	100,00		11,98	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	70.000.000	70.000.000	100,00	100,00						54.588.990	7.023.111	61.612.101	88,02	100,00		11,98	0,00
21 Pemeliharaan Mebel	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00						7.000.000	-	7.000.000	100,00	100,00		0,00	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00						7.000.000	-	7.000.000	100,00	100,00		0,00	0,00
22 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000	28.000.000	100,00	100,00						24.725.000	3.000.000	27.725.000	99,02	100,00		0,98	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	28.000.000	28.000.000	100,00	100,00						24.725.000	3.000.000	27.725.000	99,02	100,00		0,98	0,00
23 Pemelibaraan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.819.000	223.819.000	100,00	100,00						48.801.000	172.367.000	221.168.000	98,82	100,00		1,18	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	223.819.000	223.819.000	100,00	100,00						48.801.000	172.367.000	221.168.000	98,82	100,00		1,18	0,00
24 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	204.158.000	204.158.000	100,00	100,00						197.405.200	5.914.300	203.319.500	99,59	100,00		0,41	0,00
- Belanja Honorarium	1.752.000	1.752.000	100,00	100,00						1.752.000		1.752.000	100,00	100,00		0,00	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	202.406.000	202.406.000	100,00	100,00						195.653.200	5.914.300	201.567.500	99,59	100,00		0,41	0,00
25 Koordinasi dan Penyasunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	252.422.000	252.422.000	100,00	100,00						201.500.284	43.930.190	245.430.474	97,23	100,00		2,77	0,00
- Belanja Honorarium	3.942.000	3.942.000	100,00	100,00						3.360.000	582.000	3.942.000	100,00	100,00		0,00	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	248.480.000	248.480.000	100,00	100,00						198.140.284	43.348.190	241.488.474	97,19	100,00		2,81	0,00
26 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	233.986.000	233.986.000	100,00	100,00						216.935.688	1.950.300	218.885.988	93,55	100,00		6,45	0,00
- Belanja Honorarium	3.492.000	3.492.000	100,00	100,00						3.492.000		3.492.000	100,00	100,00		0,00	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	230.494.000	230.494.000	100,00	100,00						213.443.688	1.950.300	215.393.988	93,45	100,00		6,55	0,00
27 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	139.796.000	139.796.000	100,00	100,00						123.195.950	8.432.800	131.628.750	94,16	100,00		5,84	0,00
- Belanja Honorarium	15.018.000	15.018.000	100,00	100,00						12.741.800	1.227.000	13.968.800	93,01	100,00		6,99	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	124.778.000	124.778.000	100,00	100,00						110.454.150	7.205.800	117.659.950	94,30	100,00		5,70	0,00
28 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	86.433.000	86.433.000	100,00	100,00						69.530.700	11.642.450	81.173.150	93,91	100,00		6,09	0,00
- Belanja Honorarium	5.313.000	5.313.000	100,00	100,00						4.830.000	483.000	5.313.000	100,00	100,00		0,00	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	81.120.000	81.120.000	100,00	100,00						64.700.700	11.159.450	75.860.150	93,52	100,00		6,48	0,00
29 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	319.215.000	319.215.000	100,00	100,00						262.355.418	39.134.111	301.489.529	94,45	100,00		5,55	0,00
- Belanja Honorarium	95.050.000	95.050.000	100,00	100,00						86.550.000	6.500.000	93.050.000	97,90	100,00		2,10	0,00
- Belanja Barang dan Jasa	224.165.000	224.165.000	100,00	100,00						175.805.418	32.634.111	208.439.529	92,98	100,00		7,02	0,00

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD BULAN INI			REALISASI KEUANGAN									REAL FISIK	SELISIH		
			KEU (ANGGARAN KAS)		FISIK	SP2D SD BULAN LALU	SP2D BULAN INI	SP2D SD BULAN INI		SPJ SD BULAN LALU	SPJ BULAN INI	SPJ SD BULAN INI		KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK		
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
30	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	156.185.000	156.185.000	100,00	100,00					146.508.300	6.185.500	152.693.800	97,76	100,00		2,24	0,00	
	- Belanja Honorarium	6.402.000	6.402.000	100,00	100,00					5.820.000	582.000	6.402.000	100,00	100,00		0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	149.783.000	149.783.000	100,00	100,00					140.688.300	5.603.500	146.291.800	97,67	100,00		2,33	0,00	
31	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	103.172.000	103.172.000	100,00	100,00					81.655.184	13.847.478	95.502.662	92,57	100,00		7,43	0,00	
	- Belanja Honorarium	6.402.000	6.402.000	100,00	100,00					5.820.000	582.000	6.402.000	100,00	100,00		0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	96.770.000	96.770.000	100,00	100,00					75.835.184	13.265.478	89.100.662	92,07	100,00		7,93	0,00	
32	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	146.490.000	146.490.000	100,00	100,00					138.413.460	4.394.100	142.807.560	97,49	100,00		2,51	0,00	
	- Belanja Honorarium	6.402.000	6.402.000	100,00	100,00					6.402.000	-	6.402.000	100,00	100,00		0,00	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	140.088.000	140.088.000	100,00	100,00					132.011.460	4.394.100	136.405.560	97,37	100,00		2,63	0,00	
33	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	96.255.000	96.255.000	100,00	100,00					84.491.654	8.960.864	93.452.518	97,09	100,00		2,91	0,00	
	- Belanja Honorarium	6.402.000	6.402.000	100,00	100,00					6.039.000	-	6.039.000	94,33	100,00		5,67	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	89.853.000	89.853.000	100,00	100,00					78.452.654	8.960.864	87.413.518	97,29	100,00		2,71	0,00	
34	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepada Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	172.711.000	172.711.000	100,00	100,00					163.622.102	1.506.000	165.128.102	95,61	100,00		4,39	0,00	
	- Belanja Honorarium	6.402.000	6.402.000	100,00	100,00					6.039.000	-	6.039.000	94,33	100,00		5,67	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	166.309.000	166.309.000	100,00	100,00					157.583.102	1.506.000	159.089.102	95,66	100,00		4,34	0,00	
35	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	65.361.000	65.361.000	100,00	100,00					42.620.350	17.556.500	60.176.850	92,07	100,00		7,93	0,00	
	- Belanja Honorarium	5.313.000	5.313.000	100,00	100,00					5.010.000	-	5.010.000	94,30	100,00		5,70	0,00	
	- Belanja Barang dan Jasa	60.048.000	60.048.000	100,00	100,00					37.610.350	17.556.500	55.166.850	91,87	100,00		8,13	0,00	

NO	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET SD BULAN INI		REALISASI KEUANGAN								REAL. FISIK	SELISH			
			KEU (ANGGARAN KAS)		FISIK		SP2D SD BULAN LALU	SP2D BULAN INI	SP2D SD BULAN INI		SPJ SD BULAN LALU	SPJ BULAN INI		KEU SP2D	KEU SPJ	FISIK	
			(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
36	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	137.203.000	137.203.000	100,00	100,00					93.222.500	37.719.100	130.941.600	95,44	100,00		4,56	0,00
	- Belanja Honorarium	6.402.000	6.402.000	100,00	100,00					6.039.000	-	6.039.000	94,33	100,00		5,67	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	80.801.000	80.801.000	100,00	100,00					37.683.500	37.719.100	75.402.600	93,32	100,00		6,68	0,00
	- Belanja Modal	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00					49.500.000	-	49.500.000	99,00	100,00		1,00	0,00
37	Penatausahaan Barang Milik Daerah	312.518.000	312.518.000	100,00	100,00					209.471.568	89.642.042	299.113.610	95,71	100,00		4,29	0,00
	- Belanja Honorarium	35.350.000	35.350.000	100,00	100,00					31.377.000	3.050.000	34.427.000	97,39	100,00		2,61	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	227.168.000	227.168.000	100,00	100,00					130.594.568	86.592.042	217.186.610	95,61	100,00		4,39	0,00
	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00					47.500.000	-	47.500.000	95,00	100,00		5,00	0,00
38	Pengamanan Barang Milik Daerah	273.869.000	273.869.000	100,00	100,00					244.289.800	26.064.375	270.354.175	98,72	100,00		1,28	0,00
	- Belanja Honorarium	14.157.000	14.157.000	100,00	100,00					13.134.000	-	13.134.000	92,77	100,00		7,23	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	259.712.000	259.712.000	100,00	100,00					231.155.800	26.064.375	257.220.175	99,04	100,00		0,96	0,00
39	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtempahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	108.947.000	108.947.000	100,00	100,00					91.686.785	12.081.500	103.768.285	95,25	100,00		4,75	0,00
	- Belanja Honorarium	2.628.000	2.628.000	100,00	100,00					2.334.000	219.000	2.553.000	97,15	100,00		2,85	0,00
	- Belanja Barang dan Jasa	106.319.000	106.319.000	100,00	100,00					89.352.785	11.862.500	101.215.285	95,20	100,00		4,80	0,00
	Jumlah	646.909.788.000	646.909.788.000	100,00	100,00	201.166.312.471	438.867.279.060	640.033.591.531	98,94	201.096.334.052	438.933.343.958	640.029.678.010	98,94	100,00	1,06	1,06	0,00

Kebumen, Desember 2021



**IDENTIFIKASI MASALAH DAN HAMBATAN YANG DITEMUI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN  
S/D AKHIR BULAN DESEMBER 2021**

NO	NAMA KEGIATAN	IDENTIFIKASI MASALAH/ HAMBATAN		UPAYA/ SOLUSI PEMECAHAN MASALAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terserap 79,66 % dari target 100 %, deviasi 20,34%	Terdapat belanja karangan bunga ucapan sukacita/dukacita yang tidak terealisasikan karena adanya himbauan untuk tidak memberikan ucapan dalam bentuk karangan bunga dan sejenisnya.		
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terserap 74,50 % dari target 100 %, deviasi 25,50%	Bersifat Penyediaan, disesuaikan dengan riil tagihan pemakaian Air, Telepon dan Listrik		
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terserap 88,02 % dari target 100%, deviasi 11,98%	Penyediaan BBM, service dan suku cadang untuk Kendaraan Dinas Roda 2, serta BBM untuk Operasional Genset.	Direalisasikan sesuai dengan riil kebutuhan	
15	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terserap 8,77% dari target 100%, deviasi 91,23%	Terdapat penyediaan belanja tidak terduga sebesar Rp. 5.771.770.000,00		

Kebumen, Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051-FAX.(0287) 384546  
K E B U M E N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H.ARIF SUGIYANTO, S.H  
Jabatan : BUPATI KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, S.H

Pihak Pertama  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199303 1 001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN**  
**KEBUMEN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan SKPD	96%	4,37	24,31	28,90	100
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Berupa Anggaran Belanja Daerah Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah	Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset	95%	40,07	79,22	99,76	100
3.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Opini BPK atas LKPD	WTP	29,59	46,69	84,84	100

Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.970.025.000,00	21.368.960.000,00	APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	615.310.656.000,00	619.745.494.000,00	APBD
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	695.334.000.000,00	695.334.000.000,00	APBD

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**BUPATI KEBUMEN**

H. ARIF SUGIYANTO, S.H

Pihak Pertama  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN**



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740529 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**SEKRETARIS BADAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran	100%	4,37	24,31	28,90	100
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian realisasi belanja	100%	40,07	79,22	99,76	100
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian SKPD tertib administrasi asset tepat waktu	100%	29,59	46,69	84,84	100

Program/Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan	Keterangan
Program: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota			
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.597.000,00	199.587.000,00	
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36.750.063.000,00	6.662.331.000,00	
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00	
4. Administrasi umum perangkat daerah	221.497.000,00	201.497.000,00	
5. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda	6.291.768.000,00	13.653.426.000,00	
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.100.000,00	260.300.000,00	
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.000.000,00	328.819.000,00	

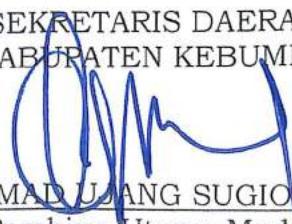


Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740529 199303 1 001

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Pertama  
 SEKRETARIS BPKAD  
 KABUPATEN KEBUMEN

Drs. WAHIB TAMAM, M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19651207 199203 1 007

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN  
  
H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641117 199201 1 002

D.6

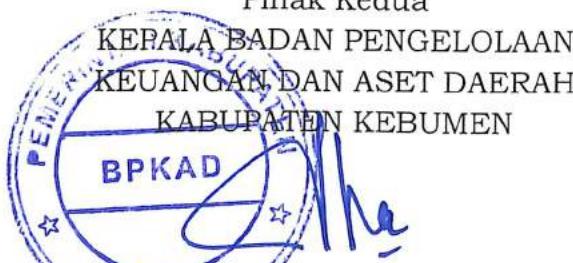
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian realiasasi belanja	100%	26,66	56,80	84,82	100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	725.062.000,00	725.062.000,00
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	280.215.000,00	319.215.000,00
2. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	166.185.000,00	156.185.000,00
3. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	110.672.000,00	103.172.000,00
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	167.990.000,00	146.490.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua



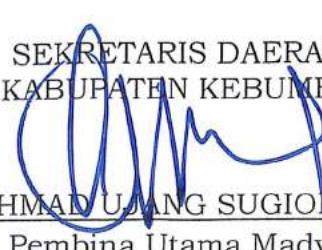
Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199303 1 001

Pihak Pertama

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN  
KAS DAERAH  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KAB.KEBUMEN

  
DWI YUNANINGSIH, SE  
Pembina  
NIP. 19771228 199703 2 004

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

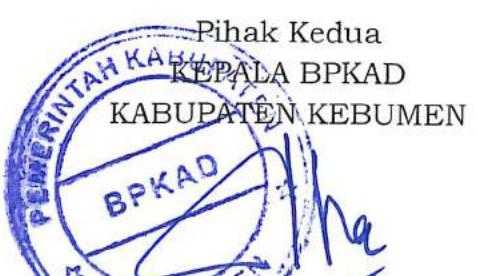
  
H. AHMAD UNG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

No.	Program	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Capaian penerbitan dokumen keuangan daerah tepat waktu	100%	40,07	79,22	99,76	100

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Program: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	993.908.000,00	916.795.000,00
1. Koordinasi dan Peyusunan KUA dan PPAS	142.968.000,00	204.158.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	208.226.000,00	252.422.000,00
3. Koordinasi dan penyusunan perda tentang perubahan APBD dan perkada tentang penjabaran perubahan APBD	226.774.000,00	233.986.000,00
4. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	324.170.000,00	139.796.000,00
5. Koordiasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	91.770.000,00	86.433.000,00

Kebumen, Oktober 2021



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199303 1 001

Pihak Pertama  
KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD  
KABUPATEN KEBUMEN

AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM  
Pembina  
NIP. 19700917 200312 2 005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19641117 199201 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
 KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
 DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Capaian Realisasi Belanja	90%	26,85	53,82	77,83	100
2.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian SKPD tertib administrasi Aset tepat waktu	83%	29,59	46,69	84,84	100

Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	546.349.000,00	471.530.000,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah	695.334.000,00	695.334.000,00

Kebumen, Oktober 2021



Pihak Pertama  
 KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI  
 BPKAD KABUPATEN KEBUMEN  
  
 ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
 Penata  
 NIP. 19860305 200903 1 001

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEBUMEN  
  
 H. AHMAD UJANG SUGIONO, SH  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19641117 199201 1 002



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pahlawan No. 138 Telp. 0287-381051 Fax (0287)384546 website :  
<http://bpkad.kebumenkab.go.id> Email : [bpkad@kebumenkab.go.id](mailto:bpkad@kebumenkab.go.id).Kode Pos 54311

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN ANGGRAENI, SE  
Jabatan : KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WAHIB TAMAM, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.  
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua

SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KAB. KEBUMEN  
BP KAD  
Drs. WAHIB TAMAM, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KAB. KEBUMEN

DIAN ANGGRAENI, SE

Penata  
NIP. 19790612 201001 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket Bimtek, Workshop dan semknar terkait pengelolaan keuangan daerah	1 Paket	0,00	0,00	0,00	100
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	31,74	63,49	100	100
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan	24,18	48,37	72,55	100
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan dan penjilidan	12 Bulan	7,60	53,14	78,69	100
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	3 Jenis	19,05	61,90	80,95	100
6.	Penyediaan Bahan/Material	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	12 Bulan	0,00	64,11	64,11	100
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	55 Orang	25,39	50,17	74,94	100
8.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2	449 unit	0,00	100	100	100
9.	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Pengadaan Mebeleur	1 unit	100	100	100	100
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan mesin lainnya gedung kantor	1 unit	78,41	100	100	100
11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 unit	23,28	100	100	100
12.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	2,38	14,29	64,29	100
13.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	24,00	48,75	73,75	100
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah petugas kebersihan kantor	12 Bulan , 5 Orang	23,79	47,57	76,08	100
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah bulan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	29,86	60,32	86,14	100

	Lapangan						
16.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Unit pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1 unit	35,71	71,42	100	100
17.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan peralatan dan mesin / pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	12 Bulan	37,09	60,63	97,50	100
18.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 unit	0,00	100	100	100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.000.000,00	63.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.497.000,00	201.497.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.291.768.000,00	13.653.426.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	282.100.000,00	260.300.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.000.000,00	328.819.000,00

Pihak Kedua  
 SEKRETARIS BPKAD  
 KABUPATEN KEBUMEN

Drs. WAHIB TAMAM, M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19651207 199203 1 007



Kebumen, Oktober 2021  
 Pihak Pertama  
 KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
 BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

DIAN ANGGRAENI, SE  
 Penata  
 NIP. 19790612 201001 2 001



MENGETAHUI  
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051-FAX.(0287) 384546  
K E B U M E N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. SRI SULISTYOWATI, SH.M.Si  
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. WAHIB TAMAM, M.Si  
Jabatan : SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN  
  
Drs. WAHIB TAMAM, M.Si  
Pembina Tk.I  
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama  
KASUBBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN  
BPKAD KAB. KEBUMEN

  
Hj. SRI SULISTYOWATI, SH.M.Si  
Pembina  
NIP. 19741112 199603 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA BADAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KEBUMEN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	41,56	71,86	92,94	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja keuangan yang disusun	26 dokumen	25,61	54,38	79,94	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	4 dokumen	17,95	43,67	69,05	100
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima tamsil Presentase jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	55 orang	4,21	10,65	15,60	100
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan penunjang tugas ASN	2 kegiatan	17,84	35,67	74,77	100
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen data penata usahaan keuangan	12 dokumen, 13 orang	21,13	52,57	80,80	100
7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Nasabah yang mendapatkan subsidi bunga melalui lembaga penyalur (BUMD/BU MS)	600 Nasabah	0,00	0,00	0,00	100
8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang mendapat Alokasi Dana Desa	449 Desa, 449 Desa, 449 Desa, 449 Desa, 22 Desa	41,16	79,05	99,99	100

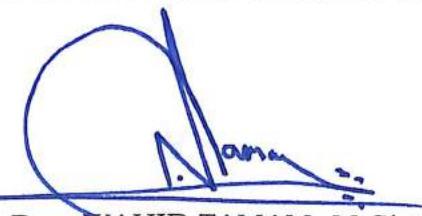
		(ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD) Jumlah Desa yang mendapatk an alokasi Bantuan keuangan khusus Jumlah Desa yang mendapatk an Bantuan Keuangan untuk operasional TPQ Jumlah Desa yang mendapat kawasan perdesaan (5 kawasan) pengembang gan produk unggulan 5 kawasan perdesaan (wisata, anyaman pandan, peternakan sapi, batik, dan gula semut) dan terlaksana nya revitalisasi bumdesma s sebagai pengelola ekonomi kawasan					
9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tidak Terduga	1 Paket	15,26	50,52	78,20	100
10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapatk an Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah	449 Desa 449 Desa	0,35	98,93	99,72	100

		Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)				
--	--	--	--	--	--	--

Kegiatan/Program	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Program: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.500.000,00	29.750.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000,00	142.740.000,00
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.097.000,00	27.097.000,00
Program : Administrasi Keuangan Perrangkat Daerah		
1. Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	36.385.260.000,00	6.289.518.000,00
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40.000.000,00	31.820.000,00
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324.803.000,00	340.993.000,00
Program: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		
1. Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	500.000.000,00	500.000.000,00
2. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	597.080.365.000,00	596.895.365.000,00
3. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.445.000.000,00	6.216.770.000,00
4. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.019.972.000,00	14.019.972.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
SEKRETARIS BPKAD KAB.KEBUMEN



Drs. WAHIB TAMAM, M.Si

Pembina Tk.I  
NIP. 19651207 199203 1 007

Pihak Pertama  
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
BPKAD KAB. KEBUMEN



Hj. SRI SULISTYOWATI, SH.M.Si.

Pembina  
NIP. 19741112 199603 2 001



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051-FAX.(0287) 384546  
**K E B U M E N**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN NAURULLITA, S.E., M.T.  
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

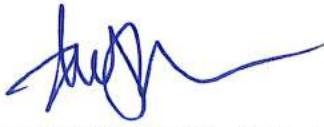
Pihak Kedua  
KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI

BPKAD KABUPATEN KEBUMEN



ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
Penata  
NIP. 19860305 200903 1 001

Pihak Pertama  
KASUBBID AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN



DIAN NAURULLITA, S.E., M.T.  
Penata Tk. I  
NIP. 19830715 200604 2 012

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KEBUMEN**

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	Jumlah dokumen pengesahan Laporan Fungsional SKPD	828 Dokumen	29,51	52,82	100	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pelaporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD	4 Dokumen	49,55	93,16	98,49	100
3	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	Jumlah Dokumen Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun	1 Dokumen	2,03	4,06	49,13	100
4	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atau Kota	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi akuntansi keuangan daerah	4 Kegiatan	6,21	7,43	26,73	100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	546.349.000,00	471.530.000,00
1. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran	124.081.000,00	96.255.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan	172.711.000,00	172.711.000,00

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		
3. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	65.361.000,00	65.361.000,00
4. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atau Kota	184.196.000,00	137.203.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI**  
**BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
Penata  
NIP. 19860305 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBID AKUNTANSI DAN PELAPORAN**  
**BPKAD KAB. KEBUMEN**

DIAN NAURULLITA, S.E., M.T.  
Penata Tk.I  
NIP. 19830715 200604 2 012





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051 – Fax. 384546  
K E B U M E N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SRI WAHYUNITA, SH  
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN  
PENATAUSAHAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN



ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M

Penata

NIP. 19860305 200903 1 001

Pihak Pertama  
KASUBBID ANALISA KEBUTUHAN  
DAN PENATAUSAHAAN  
BIDANG ASET DAN AKUNTANSI  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

  
SRI WAHYUNITA, SH  
Penata  
NIP. 19840510 201001 2 037

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN PADA BADAN**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KEBUMEN**

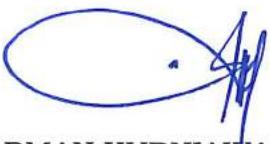
No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen, 1 Kegiatan	8,14	25,29	85,00	100

Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah	312.518.000,00	312.518.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI**  
**BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

Pihak Pertama  
**KASUBBID ANALISA KEBUTUHAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**



Arman Kurniawan, SE, M.M  
Penata  
NIP. 19860305 200903 1 001



SRI WAHYUNITA, SH  
Penata  
NIP. 19840510 201001 2 037





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051 – Fax. 384546  
**K E B U M E N**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTIJO, S.Sos  
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMINDAHΤANGANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
Jabatan : KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG ASET DAN AKUNTANSI  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN



ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M

Penata

NIP. 19860305 200903 1 001

Pihak Pertama

KASUBBID PEMANFAATAN,  
PENGAMANAN DAN  
PEMINDAHΤANGANAN  
BPKAD KAB. KEBUMEN



MARTIJO, S.Sos

Penata Tk.I

NIP. 19671006 199103 1 007

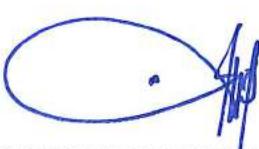
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KEPALA SUB BIDANG PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMINDAHTANGANAN**  
**PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KEBUMEN**

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah patok tanah Barang Milik Daerah yang terpasang Jumlah plang papan nama Barang Milik Daerah yang terpasang Jumlah unit kendaraan dinas Milik Daerah yang diasuransikan	200 Buah, 100 Buah, 5 unit	59,87	67,35	88,10	100
2.	Optimaliasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Kegiatan	28,15	59,46	79,65	100

Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Pengamanan Barang Milik Daerah	228.869.000,00	273.869.000,00
2. Optimaliasi Penggunaan Pemanfaatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	153.947.000,00	108.947.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG ASET DAN  
AKUNTANSI  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

  
ARMAN KURNIAWAN, SE, M.M  
Penata  
NIP. 19860305 200903 1 001

Pihak Pertama  
**KASUBBID PEMANFAATAN,  
PENGAMANAN DAN  
PEMINDAHTANGANAN  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

  
MARTIJO, S.Sos  
Penata Tk.I  
NIP. 19671006 199103 1 007





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Veteran Nomor 24 Telepon (0287) 384933 - 385662  
K E B U M E N

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSNANTO, SE  
Jabatan : KASUBBID KAS DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI YUNANINGSIH, SE  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
DAN KAS DAERAH BPKAD KABUPATEN  
KEBUMEN  
BPKAD  
DWI YUNANINGSIH, SE  
Pembina  
NIP. 19771228 199703 2 004

Pihak Pertama  
KASUBBID KAS DAERAH BIDANG  
PERBENDAHARAAN DAN KAS  
BPKAD KAB. KEBUMEN  
  
KUSNANTO, SE  
Penata TK.I  
NIP. 19640606 198903 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KASUBBID BELANJA NON GAJI PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS**  
**DAERAH BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen Rekonsiliasi harian Jumlah dokumen Rekonsiliasi Kas Daerah dengan Bank Persentase laporan realisasi OPD	270 Dokumen, 60 Dokumen, 100%	30,31	61,43	81,26	100

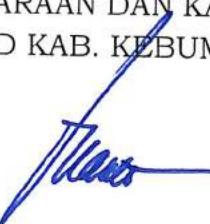
Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	280.215.000,00	319.215.000,00

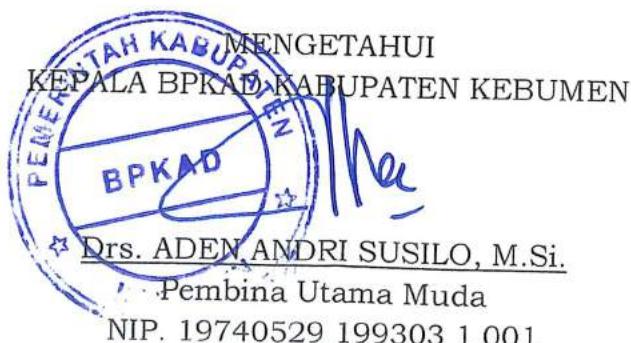
Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN  
 KAS DAERAH BPKAD KABUPATEN  
 KEBUMEN**

  
DWI YUNANINGSIH, SE  
 Pembina  
 NIP. 19771228 199703 2 004

Pihak Pertama  
**KASUBBID KAS DAERAH BIDANG  
 PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH  
 BPKAD KAB. KEBUMEN**

  
KUSNANTO, SE  
 Penata Tk.I  
 NIP. 19640606 198903 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Veteran Nomor 24 Telepon (0287) 384933 - 385662  
K E B U M E N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KUSUMONINGTYAS RETNO WIDAYANTI, SE.M.Si  
Jabatan : KASUBBID BELANJA NON GAJI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI YUNANINGSIH, SE  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS  
DAERAH BPKAD KABUPATEN KEBUMEN



DWI YUNANINGSIH, SE

Pembina

NIP. 19771228 199703 2 004

Pihak Pertama

KASUBBID BELANJA NON GAJI  
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS  
DAERAH BPKAD KABUPATEN  
KEBUMEN

KUSUMONINGTYAS RW SE.M.Si

Penata TK I

NIP. 19760724 200903 2 006

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KASUBBID BELANJA NON GAJI PADA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS**  
**DAERAH BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Penerbitan SP2D	100%	18,40	54,08	81,40	100
2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Terbitnya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan kepada PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran SKPD	3 Dok 4 Kegiatan	35,48	55,04	90,63	100

Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	110.672.000,00	103.172.000,00
2. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	167.990.000,00	146.490.000,00

Kebumen, September 2021

Pihak Pertama

KASUBBID BELANJA NON GAJI

BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS  
DAERAH BPKAD KAB. KEBUMEN

KUSUMONINGTYAS RW, SE.M.Si

Penata TK I

NIP. 19760724 200903 2 006



Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN  
KAS DAERAH BPKAD KAB. KEBUMEN

DWI YUNANINGSIH, SE  
Pembina  
NIP. 19771228 199703 2 004

KUSUMONINGTYAS RW, SE.M.Si

Penata TK I

NIP. 19760724 200903 2 006



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051-FAX.(0287) 384546  
**K E B U M E N**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajamen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENY HANDAYANI, SM  
Jabatan : KASUBBID BELANJA GAJI DAN PEMBIAYAAN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DWI YUNANINGSIH, SE  
Jabatan : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH BPKAD  
KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
KEPALA SUBBIDANG BIDANG  
PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN  
  
DWI YUNANINGSIH, SE  
Pembina  
NIP. 19771228 199703 2 004

Pihak Pertama  
KASUBBID BELANJA GAJI DAN  
PEMBIAYAAN BIDANG  
PERBENDAHARAAN DAN KAS  
DAERAH BPKAD KAB. KEBUMEN

  
ENY HANDAYANI, SM  
Penata Tk.I  
NIP. 19710608 199803 2 008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KASUBBID BELANJA GAJI DAN PEMBIAYAAN PADA BPKAD**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realiasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Pehitungan Fihak Ketiga	Persentase Tertib Penelitian SPM dan Penerbitan SKPP	100%	17,08	52,27	87,22	100

Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realiasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Pehitungan Fihak Ketiga	166.185.000,00	156.185.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN  
KAS DAERAH  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

DWI YUNANINGSIH, SE

Pembina

NIP. 19771228 199703 2 004

Pihak Pertama

KASUBBID BELANJA GAJI DAN  
PEMBIAYAAN BIDANG  
PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

ENY HANDAYANI, A.Md

Penata Tk.I

NIP. 19710608 199803 2 008





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
Jl. Veteran Nomor 24 Telepon (0287) 384933 - 385662  
K E B U M E N

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPRAPTO, SE  
Jabatan : KASUBBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI APBD BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM  
Jabatan : KABID ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG ANGGARAN  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN



AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM

Pembina

NIP. 19700917 200312 2 005

Pihak Pertama

KASUBBID PENGENDALIAN DAN  
EVALUASI APBD BIDANG  
ANGGARAN  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

SUPRAPTO, SE

Penata Tk.I

NIP. 19680807 199703 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KASUBBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI APBD PADA BPKAD**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanda dan Standar Satuan Harga	2 dokumen	5,24	16,47	88,81	100
2.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	8 kegiatan	11,49	41,08	70,80	100

Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	324.170.000,00	139.796.000,00
2. Koordinasi Perencanaan Anggaran	91.770.000,00	86.443.000,00

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

  
AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM  
Pembina  
NIP. 19700917 200312 2 005

Kebumen, Oktober 2021  
Pihak Pertama  
**KASUBBID PENGENDALIAN DAN**  
**EVALUASI APBD BIDANG ANGGARAN**  
**BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

  
SUPRAPTO, SE  
Penata Tk.I  
NIP. 19680807 199703 1 005

MENGETAHUI  
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740529 199303 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. Pahlawan Nomor 138 Telepon (0287) 381051-FAX.(0287) 384546  
**K E B U M E N**

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDRA WIJAYANTO, SE  
Jabatan : KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM  
Jabatan : KABID ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD  
KABUPATEN KEBUMEN  
  
AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM  
Pembina  
NIP. 19700917 200312 2 005

Pihak Pertama  
KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
BPKAD KABUPATEN KEBUMEN

  
ENDRA WIJAYANTO, SE  
Penata  
NIP. 19751228 201001 1 003

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**  
**KASUBBID PENYUSUNAN APBD PADA BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	4 Dok	8,48	37,68	73,93	100
2.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD	2 Dok	5,54	8,16	39,66	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Perubahan	5 Dok	3,02	23,30	100,00	100

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
Program: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		
1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	142.968.000,00	204.158.000,00
2. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	208.226.000,00	252.422.000,00
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	226.774.000,00	233.986.000,00

Kebumen, Oktober 2021

Pihak Kedua  
**KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD  
 KABUPATEN KEBUMEN**

AFIFAH INDRAWATI, SE.Ak, MM  
 Pembina  
 NIP. 19700917 200312 2 005

Pihak Pertama  
**KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 BIDANG ANGGARAN  
 BPKAD KABUPATEN KEBUMEN**

ENDRA WIJAYANTO, SE  
 Penata  
 NIP. 19751228 201001 1 003

